



<b>TAJUK</b>	<p><b>Periksa Kembali dan Evaluasi Sistem Perizinan Pembangunan Hotel di Jogja</b></p> <p>Pemerintah Kota Jogja mengajukan pembatalan empat izin perhotelan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena diduga melanggar aturan. Pengajuan pembatalan izin ini adalah buntut kasus suap perizinan hotel dan apartemen yang menjerat mantan Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, beberapa waktu lalu.</p> <p>Penjabat Wali Kota Jogja, Sumadi, mengatakan sejak kasus suap itu mencuat, Pemkot Jogja mendapat perintah agar menyisir dan memeriksa sejumlah perizinan hotel dan apartemen yang dibangun di era Haryadi. Hasilnya, sampai saat ini total ada empat hotel yang izinnya diduga bermasalah dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemkot selanjutnya bergerak</p>	<p>mengajukan izin pembatalan ke Pemerintah Pusat untuk mendapatkan persetujuan.</p> <p>Empat izin hotel yang diduga bermasalah itu satu di antaranya termasuk Apartemen Royal Kedhaton yang berada di seputaran Malioboro. Pengembang ditengarai tidak mengikuti rekomendasi berkaitan dengan bangunan gedung yang diatur oleh pemerintah.</p> <p>Selama pengajuan izin pembatalan diajukan ke Pusat, Pemkot Jogja memastikan operasional dan pembangunan hotel harus dihentikan oleh pemilik atau pengembang. Sumadi juga memastikan penyisiran terhadap sejumlah perizinan yang bermasalah masih terus dilakukan, bukan tidak mungkin izin yang akan dibatalkan malah bertambah.</p>	<p>Beberapa waktu se usai penangkapan Haryadi Suyuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengajukan pembatalan Peraturan Wali Kota Jogja (Perwal) dan rekomendasi izin pembangunan Apartemen Royal Kedhaton ke Kemendagri.</p> <p>Haryadi diketahui sewenang-wenang memberikan izin kepada PT Summarecon Agung Tbk untuk mendirikan apartemen dengan ketinggian 40 meter. Padahal pendirian bangunan ini bertentangan dengan Peraturan Gubernur No.75/KEP/2017 dan Peraturan Wali Kota Jogja No.53/2017 yang mewajibkan batas maksimal ketinggian gedung yang berada di kawasan cagar budaya adalah 32 meter.</p> <p>Sultan menegaskan lokasi pembangunan apartemen Royal</p>	<p>Kedhaton yang bermasalah tersebut merupakan daerah penyangga kawasan cagar budaya. Sehingga ada aturan yang harus diperhatikan kepada siapa saja yang ingin mendirikan bangunan di kawasan tersebut. Oleh karena itu Pemda DIY mengajukan pembatalan terhadap izin dan rekomendasi terkait pembangunan apartemen tersebut.</p> <p>Upaya Penjabat Wali Kota Jogja yang berusaha membatalkan izin empat hotel ke Kemendagri tentu patut diapresiasi. Bahkan bukan tidak mungkin masih ada perizinan sejumlah hotel yang berdiri di Kota Jogja yang bermasalah. Tak hanya izin pendirian hotel, Pemkot harus meninjau ulang semua perizinan yang diduga melanggar aturan.</p>	<p>Usulan pembatalan izin empat hotel ini harus menjadi momentum bagi Pemkot Jogja untuk membenah. Segera perbaiki sistem, aturan, prosedur dan lainnya yang bisa menjadi celah tindak pidana korupsi. Pembenahan sistem ini harus berdasarkan pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Jogja maupun DIY. Pengungkapan kasus suap yang melibatkan Haryadi Suyuti harus menjadi momentum untuk evaluasi secara menyeluruh. Terlebih, KPK juga menyatakan ada permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa di Pemkot Jogja. Kasus suap dan karut marut perizinan di Kota Jogja ini tentu harus menjadi bahan evaluasi bersama, tak hanya di lingkungan Pemkot Jogja, namun juga wilayah lain di DIY.</p>
--------------	---	---	---	---	---

	Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.		Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005